

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
DALAM JABATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:
411/B/2019/PN MKS Tahun 2019)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Muh Thezar

NIM : 10400116063

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Thezar
NIM : 10400116063
Tempat/Tanggal Lahir : Gowa, 03 Desember 1997
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum
Alamat : Jalan Ujung Bulu, Kelurahan Lembang parang,
Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan
Dalam Jabatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Makassar Nomor :411/B/2019/PN MKS Tahun 2019)

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gowa, 22 Juni 2020

Penyusun



Muh Thezar

Nim : 10400116063

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :411/B/2019/PN MKS Tahun 2019)” yang disusun oleh Muh Thezar, Nim 10400116063, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *Munqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 22 Juli 2020 M
01 Dzulhijjah 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Munqasy I	: Dr. Hamsir, S.H., M.Hum	(.....)
Munqasy II	: Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Ahkam Jayadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Anis S.Ag., M.H	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
NIP. 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil aalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah Subhanahu wata`ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin ya rabbal aalamiin.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tak pernah terputus dari kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Saparuddin dan Ibuku Mantasia, yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi serta nasihat. Tak lupa pula kepada keluarga besar penulis, kebaikan dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul skripsi yang penulis ajukan adalah “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 411/B/2019/PN Mks Tahun 2019)”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan , dukungan, serta doa yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang saya sangat hormati :

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis MA Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, M.H Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan orangtua penulis di jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dan penuh candaan.
4. Bapak Ahkam Jayadi S.H.,M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah sekaligus Pembimbing I yang senantiasa membimbing dengan penuh kebaikan.
5. Bapak Muhammad Anis S.Ag.,M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Pembimbing II yang perhatian dan senantiasa sabar.
6. Bapak Dr. Hamsir, S.H., M.Hum sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Penguji I terima kasih banyak.
7. Bapak Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H sebagai Dosen Fakultas Syariah sekaligus Penguji II dan sebagai Dosen Penasehat akademik terima kasih banyak atas kebaikan dan kesabarannya.
8. Seluruh dosen, pejabat dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada umumnya dan dosen jurusan Ilmu Hukum pada khususnya yang senantiasa mengajar penulis.

9. Para sahabat yang setia menemani dan memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung selama proses penelitian, Muh Hilmy Afiq, Irfan Sabri, Multazam Nur, dan semua yang telah mendoakan.
10. Seluruh teman-teman yang kerap kali membantu mendoakan sejak awal penulisan skripsi, Muhammad Miftah, Muh. Fadel Nur, Mokmok, Dazmang, Kilo, Nambe dan Ippank.
11. Senior-senior yang membantu dalam proses perjuangan, memberikan bantuan, dukungan yang tiada hentinya dan untuk semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu, serta teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum UINAM, serta teman-teman PPL dan KKN Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng angkatan 62.

Gowa , 22 Juni 2020

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Muh Thezar

Nim : 10400116063

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKripsi.....	ii
PENGESAHAN SKripsi.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	12
A. Analisis Yuridis.....	12
B. Tindak Pidana.....	12
C. Penggelapan.....	32
D. Jabatan.....	36
E. Penggelapan Dalam Jabatan.....	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	46
D. Metode Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	49
A. Ketentuan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.....	49
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Terjadi di Perusahaan Swasta.....	52
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara One Agung Sanjaya.....	73
BAB V PENUTUP.....	96
A. KESIMPULAN.....	96
B. IMPLEMENTASI PENELITIAN.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

.....

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah</i> dan yā'	Ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.=

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepadanya *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR)

ABSTRAK

Nama : Muh Thezar

NIM : 10400116063

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 411/B/2019/PN Mks Tahun 2019*)

Skripsi ini membahas mengenai tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (*Studi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 411/B/2019/PN Mks Tahun 2019*) selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu pertama yang bahwa bagaimanakah ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di perusahaan swasta.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang di gunakan data primer dan data sekunder. Metode dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan dan analisis data yang di gunakan adalah reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan serta analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 374 KUHP. Dan pada putusan PN Makassar No:411/B/2019/PN Mks bahwasanya dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim sudah benar akan tetapi sanksi yang diberikan oleh maelis hakim terlalu ringan, oleh karena hakim memilih pasal 374 KUHP dari dakwaan alternatif dari jaksa penuntut umum, maka bisa saja hakim memberikan sanksi pidana penjara lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Implementasi penelitian yaitu hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan hendaknya mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Negara Indonesia adalah negara hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) setelah amandemen yaitu pasal 1 ayat (3) : “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).¹ Hal tersebut berarti bahwa seluruh lini kehidupan masyarakat telah diatur oleh hukum agar perilaku masyarakat dapat terkendali sebagaimana tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Keberadaan hukum sangat penting agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam kehidupan bernegara. Masyarakat tidak bisa dipisahkan dari hukum, apabila tidak ada hukum yang mengatur maka tidak akan tercipta rasa ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia ialah sistem hukum Eropa Kontinental yang merupakan suatu sistem hukum yang dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan salah satu wujud sistem hukum peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang kemudian sistem hukum ini diadopsi dan masih berlaku sampai sekarang.

¹ Muh Amiruddin, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas*, Jurnal, 2018. Hlm. 1.

Dengan sistem yang ada akibat warisan dari jajahan Belanda (dulunya dikenal dengan Hindia Belanda), sehingga Indonesia mengenal pembagian klasik hukum yang dikenal dengan istilah Lapangan Hukum, yaitu lapangan hukum Privat seperti Hukum Perdata dan Lapangan Hukum Publik seperti hukum pidana.

Sebelum kedatangan bangsa Belanda, Indonesia telah lebih dahulu mengenal dan memberdayakan hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam artian hanya diberlakukan dalam wilayah adat tertentu saja, dan tidak berlaku di wilayah adat lainnya.²

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.³ Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yakni hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.⁴

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BAB XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

²Zaeni Asyhadie, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada : 2016), Cetakan. ke-II, Hlm. 131.

³Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), Hlm. 192

⁴Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), Cetakan. ke-I, Hlm. 1.

termaktub ke dalam Pasal 372-377.⁵ Tindak pidana penggelepan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang memiliki jabatan dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang merupakan penggelapan pemberatan, yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 374.

Secara khusus, tindak pidana penggelapan dalam jabatan juga telah diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara umum korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan jabatan, Adapun antara korupsi dan penggelapan merupakan dua tindak pidana yang berbeda unsur-unsurnya.

Korupsi dan penggelapan dalam jabatan sebenarnya memiliki perbedaan. Dari segi pengertian, Pasa 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa korupsi adalah “*perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri*

⁵Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2015), Cetakan. Ke-I, Hlm. 139.

*sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.*⁶ Sedangkan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*⁷

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum terhadap kerugian ekonomi yang diderita oleh perusahaan-perusahaan swasta tentulah harus ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum

⁶Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Hlm.23-24.

⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHAP*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada), edisi ke 5-13, Hlm. 238.

walaupun hal tersebut tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, karena negara harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya sebagai subjek hukum baik dalam perseorang maupun badan hukum.

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum untuk mengkaji lebih dalam bagaimana ketentuan yuridis terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di perusahaan perusahaan swasta (studi *Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 411/B/2019/PN Mks Tahun 2019*) serta menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul : ***Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 411/B/2019/PN Mks Tahun 2019)***

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok masalah terkait judul penulisan ini adalah ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditelaah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 374 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penulisan ini, maka penulis memberikan deskriptif terhadap beberapa kata, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Analisis Yuridis.

Pengertian analisis (analisa) menurut KBBI adalah penyidikan dan penguraian terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya.⁸ Sedangkan Yuridis menurut KBBI berarti hukum. Maka Analisis Yuridis adalah penelitian kembali terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan pendekatan hukum yang berlaku.

b. Tindak Pidana.

Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

c. Penggelapan.

Penggelapan menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah *"barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah*

⁸Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya Apollo, 1998), Hlm. 30.

⁹Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Hlm.35.

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”¹⁰

d. Jabatan.

Bagir Manan memberikan definisi dari jabatan, menurutnya jabatan ialah lingkungan kerja yang tetap serta bersifat abstrak dengan fungsi-fungsi tertentu, yang secara keseluruhan mencerminkan kerja dari sebuah organisasi. Sifat abstrak dari sebuah jabatan, mengharuskan adanya pejabat yang diberikan wewenang dan tanggung jawab agar jabatan dapat menjadi konkret dan fungsi-fungsinya dapat dijalankan.¹¹

e. Penggelapan dalam Jabatan

Menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penggelapan dalam jabatan ialah *”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu.”¹²*

¹⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHAP*, Hlm.238.

¹¹ Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018) Cetakan Ke-I, Hml. 48.

¹² R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHAP*, (Jakarta :RajaGrafindo Persada), Edisi ke-V, 2007, Hlm. 238.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok, yaitu :

1. Bagaimanakah ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di perusahaan swasta?

D. Kajian Pustaka

Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 411/B/2019/PN Mks Tahun 2019). Ada beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan yakni:

1. Jonaedi Effendi, dalam bukunya yang berjudul *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, buku ini membahas mengenai dasar-dasar hukum pidana dengan penggambaran materi hukum pidana dengan sederhana. Dalam buku ini juga membahas mengenai tindak pidana penggelapan, serta menyinggung mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Namun dalam buku ini materi mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan pembahasannya sangat sedikit.
2. Rahman Syamsuddin, dalam bukunya *Merajut Hukum di Indonesia*, dalam buku ini memberikan pembahasan mengenai bentuk hukum dan sistem

hukum, serta membahas mengenai masalah tindak pidana dimana pada penulisan skripsi ini sedikit mengutip dari buku ini dalam pembahasannya.

3. Buku saku KPK, *Memahami Untuk Membasmi*, buku ini merupakan buku yang ditulis dan diterbitkan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), buku ini membahas mengenai penjelasan bentuk-bentuk suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam buku ini juga penulis mengutip sedikit untuk di angkat dalam penulisan skripsinya.
4. Mahendri Massie dalam jurnalnya *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*. Dalam jurnal tersebut, membahas mengenai ketentuan yuridis tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah diatur dalam pasal 415 KUHP. Penulis banyak belajar dari jurnal ini serta mengutip sedikit dari penelitian jurnal tersebut.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok dari permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan yuridis terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di perusahaan swasta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoretik

Secara teoritik penenelitian ini diharapkan mampu memberikan perkembangan bagi ilmu hukum, khususnya bagi bidang hukum pidana.

b. Kegunaan praktisi

Diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta secara khusus kepada mahasiswa dan para praktisi hukum agar dapat memahami untuk membasmi tindak pidana penggelapan dalam jabatan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Analisis Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) analisis dari asal kata analisa yang berarti penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya¹³. Menurut kamus hukum, yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis merupakan tindakan penyidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari segi atau menurut hukum.

Analisis juga dapat berarti mengolah data, pada analisis yuridis dapat pula berarti proses mengolah data untuk mengetahui kejadian sebenarnya dari suatu peristiwa hukum.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut bahasa, tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *criminal act* atau *a criminal offense*. Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan istilah *strafbaar feit* yang artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri dari 2 suku kata yaitu tindak dan pidana. Tindak dapat diartikan sebagai tingkah atau perbuatan. Sedangkan pidana yang dalam bahasa

¹³ Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Hlm. 30.

Inggris disebut *crime* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafsering* diartikan dengan istilah hukuman.¹⁴

Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang karenanya pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP, Sebagai contoh, pasal 338 KUHP menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dimana didalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan tersebut, menurut Pasal 338 KUHP, pelaku seharusnya dipidana penjara paling lama 15 tahun.¹⁵

Ada beberapa definisi mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Chairul Chuda membeikan definisi dari tindak pidana, menurutnya tindak pidana ialah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Selanjutnya menurut beliau jika dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat dari orang yang melakukan tindak pidana

¹⁴Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Hlm. 11.

¹⁵Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2012), Cetakan Ke-2, Hlm.57-58.

tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yakni pertanggungjawaban pidana.¹⁶

b. Menurut D Simons, tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde "onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbar person"*)¹⁷

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, "tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana".¹⁸

d. Menurut G.A, van Hamel, sebagaimana yang telah diterjemahkan oleh Moeljatno, bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan orang (*menselijke gendraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoritis dan dari sudut undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat

¹⁶Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, Hlm.193.

¹⁷D. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht. Erste Deel. Virde druk. P. Nooordhoff, Groningen*, Hlm. 101.

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta-Bandung: Eresco, 1981), Cetakan Ke-III, Hlm. 50.

¹⁹Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Bina Aksara, 1984), Cetakan ke-II, Hlm. 56.

ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁰

Seseorang tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas. Yakni perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, serta dapat dicela.²¹

Ada dua unsur dalam tindak pidana, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif tindak pidana merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas dalam hukum pidana mengatakan bahwa “*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*” (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini ialah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan terdiri atas terdiri atas tiga, yaitu:

1) Kesengajaan karena maksud disebut dengan istilah *oogmerk*.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2002), Cetakan. Ke-I, Hlm. 78-79.

²¹Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta : CV Budi Utama, 2018)cet. Ke-1, Hlm. 74.

- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti disebut dengan istilah *opzet als zekerheidsbewustzijn*.
- 3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan disebut dengan istilah *dolus evantuali*.)²²

c. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, yang berupa:
 - a) *Act*, merupakan perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - b) *Omission*, merupakan perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendingkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia. Yang dimaksud ialah akibat yang membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum seperti nyawa, badan, serta yang menyangkut dengan kemerdekaan, kehormatan, dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*);

Pada umumnya, keadaan-keadaan tersebut dapat dibedakan menjadi antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

²²Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, Hlm.194.

- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum ialah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah untuk melakukan sesuatu.²³

Menurut Moeljatno sendiri, unsur-unsur tindak pidana adalah “perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil)”. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno ialah antara lain sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ihwal ataupun keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang terbagi menjadi antara lain:
 - 1) Unsur subjektif atau unsur pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya yaitu unsur pegawai negeri yang diperlukan pada delik jabatan seperti pada perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Jika yang menerima hadiah adalah bukan seorang pegawai negeri maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan.

²³Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, Hlm.195.

2) Unsur objektif atau unsur non-pribadi, yaitu unsur yang mengenai keadaan dari luar diri si pelaku, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.²⁴ Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, ataupun memperberat pidana yang dijatuhkan.

a) Unsur keadaan yang menentukan, misalnya pada Pasal 164, 165 dan 531 KUHP.

Sebagai salah satu kewajiban untuk melapor pada pihak yang berwenang, apabila seseorang mengetahui bahwa akan terjadi suatu tindakan kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan sebuah perbuatan pidana apabila kejahatan tadi yang diketahuinya tersebut betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu merupakan unsur tambahan, Kewajiban memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan sebuah perbuatan pidana kalau orang yang dalam keadaan bahaya tersebut kemudian meninggal dunia. Syarat tambahan tidak dipandang sebagai unsur delik atau perbuatan pidana saja, tetapi sebagai syarat penuntutan.

²⁴Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Hlm. 40.

b) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Misalnya ialah pada tindak pidana penganiayaan biasa, yang telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila tindak pidana penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidananya diperberat menjadi 5 tahun (Pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika tindak pidana penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian bagi korban, maka ancaman pidana diperberat menjadi 7 tahun penjara (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

c) Unsur melawan hukum.

Unsur melawan hukum sangat penting karena unsur ini yang menentukan apakah seseorang itu dapat dijatuhkan pidana atau tidak. Perumusan unsur pada delik ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur yang tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis dalam perumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah sangat jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Contoh misalnya adalah pada pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan.²⁵

²⁵Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Hlm.40-41.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada ketentuann dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di Indonesia, untuk memberikan pemahaman terhadap jenis-jenis tindak pidana terbagi atas beberapa jenis, antara lain:

a. Kejahatan dan pelanggaran

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai pembagian tindak pidana, KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu Kejahatan (*Minsdrijven*) dan Pelanggaran (*overtreningen*).

Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran ini adalah penting karena membawa akibat-akibat tertentu.²⁶ Penggolongan tindak pidana diatur juga diluar KUHP yang dikenal sebagai tindak pidana khusus. Undang-undang pidana khusus *a quo* tidak semuanya menetapkan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran hanya di jumpai dalam Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 atau Undang-Undang Tidak Pidana Ekonomi.²⁷

Beire dan James Messerschmidt mengemukakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana itu disebut sebagai *legal definition of crime* yang dapat dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* yang disebut sebagai kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam

²⁶Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta :CV. Budi Utama, 2017), Hlm. 41.

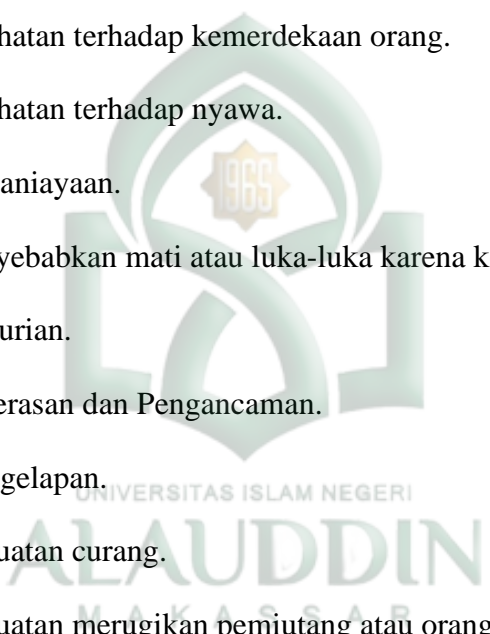
²⁷ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana*, *Jurnal*, 2015, Hlm.9.

masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Sedangkan *malaprohobita* yang diidentikkan dengan pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.²⁸

Yang termasuk kedalam tindak pidana kejahatan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) meliputi :

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara.
- 2) Kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya.
- 4) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan.
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum.
- 6) Perkelahian tanding.
- 7) Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.
- 8) Kejahatan terhadap penguasa umum.
- 9) Sumpah palsu dan keterangan palsu.
- 10) Pemalsuan mata uang dan uang kertas.
- 11) Pemalsuan materai dan merek.

²⁸ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana*, Jurnal, 2015, Hlm.5.

- 
- 12) Pemalsuan surat.
 - 13) Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan.
 - 14) Kejahatan terhadap kesusilaan.
 - 15) Meninggalkan orang yang perlu ditolong.
 - 16) Penghinaan.
 - 17) Membuka rahasia.
 - 18) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.
 - 19) Kejahatan terhadap nyawa.
 - 20) Penganiayaan.
 - 21) Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan.
 - 22) Pencurian.
 - 23) Pemerasan dan Pengancaman.
 - 24) Penggelapan.
 - 25) Perbuatan curang.
 - 26) Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak.
 - 27) Menghancurkan atau merusakkan barang.
 - 28) Kejahatan jabatan.
 - 29) Kejahatan Pelayaran.
 - 30) Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

31) Penadahan penertiban dan percetakan.²⁹

Adapun tindak pidana yang tergolong sebagai pelanggaran, meliputi:

- 1) Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.
- 2) Pelanggaran ketertiban umum.
- 3) Pelanggaran terhadap penguasa umum.
- 4) Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan.
- 5) Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan.
- 6) Pelanggaran kesusilaan.
- 7) Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan.
- 8) Pelanggaran jabatan; dan
- 9) Pelanggaran pelayanan.³⁰

b. Delik – Delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Delik berasal dari bahasa Latin yakni dari kata *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *delict*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *delic*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³¹

²⁹Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Hlm. 17.

³⁰Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, h. 17.

³¹Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Cet.1; Jakarta :Sinar Grafika, 1991), h. 3.

Di dalam KUHP dikenal ada delik materil dan delik formil, perbedaan diantara dua delik tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Delik formil merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
- 2) Delik meteril merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu terjadi. Kalau belum terjadi maka paling banyak hanya ada percobaan.³²

Selain delik formil dan delik materil, didalam KUHP masih dikenal dikenal juga pembagian delik menurut rumusan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang yaitu:

- 1) *Doleuse delicten*, dan *culpose delicten*;
 - *Doleuse delicten* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Rumusan undang-undang mempergunakan istilah “*opzettelijk*”, akan tetapi juga dikenal dengan perbuatan yang dilakukan karena “*dolus*” atau “*opzet*”, seperti misalnya 338 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja.
 - *Culpose delicten* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan, atau

³²Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 45.

“*Nalatigheid*” atau “*nachtzammheid*”. Rumusan undang-undang mempergunakan istilah *schuld*, seperti misalnya pada pasal 359 tentang pembunuhan dengan sebab kelalaian/kealpaan.

2) *Formeele delicten*, dan *materiële delicten*.

- *Formeele delicten* ialah merupakan rumusan undang-undang yang menitikberatkan pada kelakuan yang dilarang serta diancam oleh undang-undang, sebagai contoh misalnya pada pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian.
- *Materiële delicten* ialah merupakan rumusan undang-undang yang menitik beratkan kepada akibat yang dilarang serta diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang, seperti misalnya pada pasal 35 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan.

3) *Commisie delicten*, dan *ommissie delicten*

- *Commisie delicten* merupakan delik yang terjadi karena perbuatan seseorang, yang melanggar larangan untuk melakukan sesuatu.
- *Omissie delicten* merupakan delik yang terjadi karena seseorang tidak melakukan sesuatu atau melanggar apa yang menjadi sebuah perintah.

4) *Zelfstandige delicten*, dan *voorgezette delicten*

- *Zelfstandige delicten* merupakan delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu.

- *Voorgezette delicten* merupakan delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut.
- 5) *Aflopemde delicten*, dan *voordurende delicten*
 - *Aflopemde delicten* adalah delik-delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti misalnya pasal pembunuhan dan pasal penghasutan.
 - *Voordurende delicten* ialah merupakan salah satu delik yang terdiri dari melangsungkan ataupun membiarkan suatu keadaan yang terlarang, meskipun keadaan tersebut pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Misalnya pasal 221 tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata uang.
- 6) *Enkelvoudige delicten*, dan *semengestelde delicten*
 - *Enkelvoudige delicten* mempunyai arti yang hampir mirip dengan “*Aflopemde delicten*” yaitu delik yang selesai dengan satu kelakuan.
 - *Semengestelde delicten* yaitu delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan. Ada juga yang menyebut dengan istilah “*collective delict*”. Delik ini pada umumnya menyangkut tentang kejahatan karena mata pencaharian atau karena kebiasaan atau karena pekerjaan, misalnya pasal 480-481 tentang penadahan, pasal 512 a - 520 tentang melakukan pekerjaan harus dengan kewenangan

untuk pekerjaan itu atau praktik dokter tanpa izin, dan beberapa golongan “*bedrijfsdecten*” atau “*beroepsdelictenn*” yaitu pasal-pasal 295, 296, 299, 303 mengenai kejahatan memudahkan perbuatan cabul, memberikan obat untuk menggugurkan kandungan serta tindak pidana perjudian.

7) *Eenvoudige delicten*, dan *gaqualificeerde delicten*

- *Eenvoudige delicten* merupakan delik biasa, yang dilawankan dengan “*gekwaltificeerde delicten*”, yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur yang meringankan.
- *Gaqualificeerde delicten* diantaranya tersebut terdapat dalam pasal 362 sebagai *eenvoudige delict* menjadi bentuk pasal 363 dengan disertai pemberatan pidana karena adanya syarat-syarat tertentu. Demikian juga pasal 365 terhadap pasal 362, pasal 374 terhadap pasal 372, serta pasal 264 terhadap pasal yang terdahulu mengatur pemberatan dari pasal yang kemudian. Selanjutnya “*Geprivilegieerde delicten*” antara lain tersebut dalam pasal 341 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306 dan lain-lain sebagainya.

8) *Politieke delicten* dan *commune delicten*

- *Politieke delicten* adalah delik yang dilakukan karena adanya unsur politik, yang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- “*zuivere politieke delicten*” dan “*landverrad*” sebagaimana yang diatur dalam pasal 104-110 tentang pengkhianatan intern dan pasal 212, 124, 126 tentang pengkhianatan ekstern;
 - “*gemende politieke delicten*” deli yang merupakan pencurian terhadap dokumen negara; dan
 - “*connexe politieke delicten*” delik yang merupakan kejahatan menyembunyikan senjata.
- *Commune delicten* merupakan delik yang ditujukan kepada kejahatan yang tidak termasuk keamanan negara, misalnya penggelapan, pencurian, dan lain-lain sebagainya.
- 9) *Delicta propia*, dan *commune delicten*
- *Delicta propia* merupakan delik yang dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu karena kualitas, misalnya delik jabatan dan delik militer.
- *Commune delicten* merupakan delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya.
- 10) Delik yang ditentukan menurut kepentingan hukum yang dilindungi. Misalnya adalah delik aduan, delik harta kekayaan, dan lain-lain sebagainya.³³

³³Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, Hlm.197-200.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kesengajaan.

1) Kesengajaan (*dolus*).

Kesengajaan atau yang dikenal dengan istilah *dolus* telah diatur dalam *Crimineel Wetboek* (CW) atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809 dicantumkan bahwa “*kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang*”. Hal ini juga telah diatur dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa, “*kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu*.”³⁴

Satochid Kartanegara juga mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *obzet willens en weten* (dikenhendaki dan diketahui) adalah “seorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu.”³⁵

2) Kealpaan (*culpa*).

Dalam doktri hukum yang berlaku, *schuld* atau yang lebih dikenal dengan kesalahan terdiri dari kesengajaan dan kealpaan. Kedua hal tersebut dibedakan berdasarkan kehendaknya. Para sarjana sependapat

³⁴Laden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik - Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), Hlm. 13.

³⁵Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta), Hlm. 291.

bahwa “kealpaan” merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Oleh karena itu, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan.³⁶

Simons menerangkan kealpaan terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan sesuatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.³⁷

4. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana ialah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (Belanda: *natuurlijk person*) saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, oleh karenanya hanya manusia saja yang merupakan subjek dari tindak pidana dalam KUHP.³⁸

Tetapi pada perkembangannya, subjek dari tindak pidana ini tidak hanya manusia saja, melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. Korporasi dalam

³⁶Laden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik - Hukum Pidana*, Hlm. 25.

³⁷Tirtaamidjaja, *Pokok-Poko Hukum Pidana*, (Jakarta :Fasco, 1955). Hlm. 55.

³⁸Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Hlm. 82.

buku 1 Pasal 120 Rancangan KUHP 1987/1988, diberi pengertian yaitu sebagai berikut : *“korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan”*.³⁹

C. Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Pengertian penggelapan menurut Pasal 372 KUHP

“tindak pidana penggelapan adalah barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁴⁰

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah : *“Suatu kejahatan yang hampir mirip dengan pencurian dalam pasal 362, bedanya adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tindak dengan jalan kejahatan”*.⁴¹

2. Unsur-Unsur Penggelapan

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam pasal 372 memiliki dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu: memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada

³⁹Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,(Jakarta : Kencana 2015), Cetakan ke-2 Hlm.50

⁴⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHP*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), edisi ke lima, ,2007, Hlm. 238

⁴¹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana (Peraturan dan Delik-delik Khusus)*, (Bogor Politeria : 1984), Hlm. 68.

padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektif, yaitu dengan sengaja; dengan melawan hukum.⁴²

Maksud dari memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau sesuatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata dan merupakan tindakan sebagai pemilik barang, yang tidak memberi kesempatan kepada pemiliknya untuk meminta kembali, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menyembunyikan atau mengingkari barang yang telah diterima dan dikuasainya sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki.

“Dengan sengaja” memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah disadari dan diketahui ketika menguasai barang yang ada padanya, dengan tidak mau mengembalikan dan perbuatan yang dilakukan disadari telah melawan hukum atau melawan kehendak dari pemilik barang. Barang yang dikuasai semata-mata ditujukan terhadap barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan menyadari barang yang dikuasai itu bukan karena kejahatan, melainkan barang dalam penguasaannya. Penguasaan atas barang itu atas kepentingan pribadinya.⁴³

Sementara itu menurut Wawan Tunggal Alam, tindak pidana penggelapan memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki dengan melawan hukum.
- b. Barang itu kepunyaan orang lain.

⁴²Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Hlm.140

⁴³Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Hlm.140

- c. Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan.
- d. Barang itu berada padanya sebelum melakukan penggelapan.⁴⁴

3. Bentuk-Bentuk Penggelapan

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah menggolongkan mengenai bentuk-bentuk penggelapan yaitu sebagai berikut :

a. Penggelapan Dalam Bentuk Pokok (Penggelapan Biasa)

Penggelapan dalam bentuk pokok telah diatur dalam pasal 372 KUHP. Kejahatan ini dinamakan dengan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, hanya bedanya jika dalam penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau barang tersebut sudah dipercayakan kepadanya.⁴⁵

Unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur-unsur objektif, terdiri dari :
 - a) Perbuatan memiliki.
 - b) Sesuatu benda.
 - c) Yang sebahagian atau keseluruhan milik orang lain.
 - d) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- 2) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari :

⁴⁴Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara (Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehar-hari)*, (Jakarta Milenia Populer), 2002, hlm. 117

⁴⁵Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Hlm.140

- a) Dengan sengaja.
- b) Dan melawan hukum.⁴⁶

b. Penggelapan Ringan (Dalam Bentuk *Geprivilegeerd*)

Penggelapan ringan telah diatur dalam pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yakni merupakan *“perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringandengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”*.⁴⁷

c. Penggelapan dengan Pemberatan Pasal 374 KUHP;

Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan ialah,

*“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam pidana paling lama lima tahun,”*⁴⁸

Unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggelapan;
- 2) Dilakukan oleh seseorang;

⁴⁶Mahendri Masiie, *Tindak pidana dengan Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal, 2015, Hlm. 5.

⁴⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHP*, (Raja Grafindo Persada : 2017), edisi ke lima, Hlm. 238.

⁴⁸ R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHP*, Hlm.238

- 3) Benda;
- 4) Ada dibawah kekuasaannya;
- 5) Dikarenakan;
 - a) Hubungan kerja pribadi
 - b) Mata pencariannya
 - c) Mendapat imbalan jasa atau tegen.⁴⁹

d. Penggelapan Berat, Pasal 375 KUHP

Dalam pasal 374 KUHP menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan berat ialah, *“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali, pengampuan, pengurus, atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial, atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasai, selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”*.⁵⁰

Yang merupakan tindak pidana penggelapan berat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggelapan yang dilakukan seorang karena terpaksa disuruh meyimpang barang itu (misal karena ada kebakaran, banjir, atau malapetaka. Orang terpaksa menitipkan barang-barangnya kepada

⁴⁹Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, (Bandung :Tarsito, 1979), Hlm. 211

⁵⁰R. Muhammad Muhandi & Maman S. Muhayana, *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), Hlm. 383

orang lain, kemudian oleh orang yang menyimpan barang itu kemudian digelapkan).

- 2) Penggelapan yang dilakukan oleh wali, kurator, pengurus, orang-orang yang menjalankan wasiat, atau pengurus balai darma terhadap suatu barang yang ada dalam tangan karena jabatan itu.⁵¹

D. Jabatan

1. Pengertian Jabatan

Bagir Manan memberikan definisi mengenai jabatan, menurutnya jabatan ialah lingkungan kerja yang tetap serta bersifat abstrak dengan fungsi-fungsi tertentu, yang secara keseluruhan mencerminkan kerja dari sebuah organisasi. Sifat abstrak dari sebuah jabatan, mengharuskan adanya pejabat yang diberikan wewenang dan tanggung jawab agar jabatan dapat menjadi konkret dan fungsi-fungsinya dapat dijalankan.⁵²

2. Jenis-jenis jabatan

a) Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan

Pejabat negara ialah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan dari suatu negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Anggota DPR, Presiden,

⁵¹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana (Peraturan dan Delik-delik Khusus)*, (Bogor Politeria : 1984), Hlm. 68.

⁵² Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Hlm.48

dan Hakim merupakan contoh dari pejabat negara. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan tugas dan fungsinya untuk dan atas nama negara.

Sedangkan pejabat pemerintahan merupakan pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif negara saja atau biasanya disebut sebagai pejabat administrasi negara. Seperti contohnya ialah para menteri-mentri yang bertugas untuk membantu tugas presiden, serta aparatur pemerintahan yang lain yang berada dalam lingkungan eksekutif. Khusus untuk kedudukan presiden. Pada sistem pemerintahan presidensil, maka presiden memiliki kedudukan selaku kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara, presiden memiliki fungsi sebagai alat kelengkapan negara, hal tersebut telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Sebagai kepala negara, presiden dapat pula digolongkan sebagai pejabat negara. Namun, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan, berarti bahwa presiden adalah penyelenggara kekuasaan eksekutif, baik penyelenggaraan yang bersifat umum maupun penyelenggaraan yang bersifat khusus. Berdasarkan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan inilah presiden juga dapat dikategorikan sebagai pejabat pemerintahan.⁵³

⁵³Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Hlm.45-46

b) Pejabat di perusahaan swasta

Sebuah perusahaan akan mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan lainnya apabila memiliki beberapa faktor yang dapat mendukung untuk memajukan suatu perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mendukung ialah sistem struktur management yang solid, dan mampu menjaga kerjasama serta koordinasi baik secara teknis maupun non teknis. Struktur management perusahaan swasta terbentuk dari sekumpulan karyawan atau pekerja yang mempunyai jabatan, baik dari jabatan terendah hingga jabatan tertinggi. Dengan adanya sebuah jabatan agar dapat membedakan level antar karyawan atau pekerja, sehingga kita bisa membedakan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing.

E. Penggelapan Dalam Jabatan

1. Pengertian Penggelapan Dalam Jabatan

Pengertian penggelapan dalam jabatan disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 374 yaitu *“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”*.⁵⁴

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana penggelapan yang diperberat. Artinya ialah ada kondisi khusus yang menyebabkan tindak pidana ini bukan tindak pidana penggelapan biasa. Keadaan khusus tersebut ialah apabila tindak pidana

⁵⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *KUKHP dan KUHP*, Hlm. 238

penggelapan yang berkaitan dengan jabatan. Jabatan yang dimaksud adalah posisi dalam pekerjaan tetapi bukan dalam ruang lingkup pegawai sipil (PNS).⁵⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Ada beberapa unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yakni sebagai berikut:

- a. Unsur objektif, yaitu memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan; hubungan kerja secara pribadi; hubungan kerja dalam mata pencarian atau profesinya; memperoleh upah uang.
- b. Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum.

Adapun unsur pemberatan-pemberatan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu antara lain:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan karena adanya hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga, atau majikan dan buruh.
- b. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya.

⁵⁵ Rocky Marbun, *Kiat Jitu menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta : Visimedia, 2011), Hlm.

Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

- c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.⁵⁶

3. Korupsi yang Terkait dengan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 8 berasal dari Pasal 415 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pada undang-undang tersebut, pasal 8 disebutkan bahwa *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”*.

⁵⁶Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Hlm. 142.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, dapat dilihat dari unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- a) Pegawai negeri (PNS) atau orang selain pegawai negeri yang diberikan tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- b) Dengan sengaja;
- c) Menggelapkan ataupun membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- d) Uang atau surat berharga;
- e) Yang disimpan karena jabatannya;⁵⁷

4. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Hukum Pidana Islam.

- a) Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari istilah fikih jinayah, yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fikih dalam hukum Islam. Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fikih jinayah, apabila di definisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yakni fikih dan jinayah.⁵⁸ Secara etimologis, fikih berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang dapat berarti

⁵⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Hlm. 57.

⁵⁸Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Amzah, 2016), Cet. Ke-1, Hlm. 2.

memahami ucapan secara baik.⁵⁹ Adapun istilah jinayah yang juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *jana – yajni – janyan – jinayatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala al-adzhaba* (seseorang mengumpulkan emas dari pertambangan).⁶⁰

Pengertian secara terminologi, bahwa hukum pidana Islam atau fikih jinayah ialah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Al-Qur`an dan Hadits tentang kriminalitas yang berkaitan dengan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik yang menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan [nasab], dan harta) maupun tidak.⁶¹

b) Dalil Al-Qur`an dan Hadits Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

Al-Qur`an tidak menjelaskan secara terperinci mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tetapi ada nash-nash dalam Al-Qur`an yang menyebutkan mengenai unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Allah Subhanahu wata`ala berfirman dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵⁹Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk. (*Al-Mu`jam Al-Wasith*), (Dar Al-Ma`arif, Mesir : 1972), Hlm. 698.

⁶⁰Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk. (*Al-Mu`jam Al-Wasith*), Hlm. 141

⁶¹Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Hlm. 12.

Terjemahannya :

*“Dan janganlah sebahagian dari kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui”.*⁶²

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Al-Mustaurid bin Musyaddad, Bahwasanya Nabi *Shallallahu `alai wa sallam* bersabda yang artinya :

“Barangsiapa yang kami angkat sebagai aparatur negara hendaklah ia menikah (dengan biaya tanggungan negara). Jika tidak mempunyai pembantu rumah tangga hendaklah ia mengambil pembantu (dengan biaya tanggungan negara). Jika tidak memiliki rumah hendaklah dia membeli rumah (dengan biaya tanggungan negara). Abu Bakar *Radiyallahu anhu* berkata, bahwasanyaaku diberitahu, Rasulullah *Shallallahu `alai wa sallam*: “Barangsiapa (aparatur) yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan sungguh dia telah berbuat *ghulul* atau dia telah mencuri”.⁶³

Dalam buku *Raudhatun Na`im* disebutkan bahwasanya diantara hal yang termasuk *ghulul* ialah menggelapkan harta milik ummat Islam. Ibnu Hajar al-Haitami berkata, “Sebagian para ulama berpendapat bahwa

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`anul Karim Terjemahan Dan Tajwid*, (Az-Zayadah, Surakarta : 2014)

⁶³ Hadits Riwayat Abu Daud, di Shahihkan oleh Syaikh Al-Albani

menggelapkan harta milik ummat islam yang berasal dari *baitul maal* (kas negara) dan zakat termasuk *ghulul*".⁶⁴



⁶⁴<https://www.google.com/amp/s/risalahnet.wordpress.com/2014/02/12/korupsi-ghulul-menggelapkan-harta-rakyat/amp/> Di akses pada tanggal 22 September 2019, pukul : 15:50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah, kemudian dalam penyusunannya ini didukung dengan literatur dari adalah buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dan karya tulis lainnya.

2. Lokasi penelitian

Penulis menentukan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) sehingga jenis penelitian ini mengharuskan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dan penulis memilih Pengadilan Negeri Makassar sebagai lokasi penelitian, melihat bahwa putusan dan kasus tersebut kewenangan mengadilinya berada di Pengadilan Negeri Makassar.

B. *Pendekatan Penelitian*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian

1. Pendekatan yuridis normatif, yaitu merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Pendekatan empiris, yaitu merupakan pendekatan dengan melihat kenyataan dan fakta-fakta yang konkrit mengenai putusan pengadilan yang akan penulis teliti.

C. Sumber Data

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pokok yang digunakan dalam penulisan skripsi. Sumber data primer merupakan sumber data berupa dokumen-dokumen hukum yang sifatnya positif atau mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam masyarakat. Cohen dan Olson memberikan definisi bahwa bahan hukum primer ialah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara (*Enfoeced by the state*).⁶⁵

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi data yang diperoleh melalui sumber lain. Sumber data ini diperoleh dengan cara data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara, baik secara komersial maupun non komersial.⁶⁶

⁶⁵I Mada Pasek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta :Prenada Media Grup, 2016). Hlm. 142.

⁶⁶Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018) Cet. Ke-1, Hlm. 215.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Salah satu metode utama dalam mengumpulkan data kualitatif adalah dengan cara wawancara. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh keterangan dan informasi dengan cara berbicara satu sama lain antara pewawancara dengan narasumber tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁶⁷

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengambilan gambar saat proses penelitian sedang berlangsung. Dokumentasi biasanya berupa pengambilan data yang diperoleh dari dokumen pendukung penelitian.⁶⁸

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.

1. Teknik Pengelolaan.

Teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni antara lain sebagai berikut:

- a. Reduksi data, ialah merupakan proses untuk mengubah suatu data dalam bentuk pola, fokus, ataupun pokok-pokok permasalahan tertentu.
- b. Penyajian data, ialah merupakan bentuk penampilan data dengan cara memasukkan data sesuai dengan yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.

⁶⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm.108.

⁶⁸Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) Cetakan ke-5, Hlm.73

- c. Pengambilan keputusan, ialah merupakan metode mencari kesimpulan atas suatu data yang direduksi dan disajikan.

2. Analisis Data.

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deksriptif kualitatif yaitu teknik pengelolaan data yang dilakukan dengan cara pendeskripsian hasil dari sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Ketentuan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur secara eskplisit pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diatur pada Pasal 374. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.⁶⁹

⁶⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor Politeria : 1995), Hlm. 259

Pasal 374 dalam KUHP hanyalah bentuk pemberatan dari pasal 372 KUHP yang merupakan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu apabila tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga jika pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.

Pemberatan lainnya adalah berhubungan juga dengan unsur pemberatan pidana karena jabatan, sebagaimana pada pasal 52 KUHP, *"Bila seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.*

Adami Chazawi menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran hukum pidana bagian ke-2 "Pemberatan pidana karena jabatan yang didasarkan pada keadaan yang melekat atau timbul dari jabatan adalah wajar, mengingat keadaan-keadaan dari jabatan itu dapat diperlancar atau dipermudah terjadinya tindak pidana, dan juga dari orang itu membuktikan niat buruknya yang lebih kuat untuk mewujudkan apa yang dilarang oleh undang-undang.⁷⁰

Yang perlu diperhatikan dalam menentukan pasal pada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan ialah dengan memperhatikan jabatan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana dalam rana jabatan

⁷⁰ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2005), Hlm 79.

swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu melakukan penggelapan dengan memanfaatkan jabatannya dalam rana pemerintahan, maka tindakannya tidak bisa dikenai pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana.

Tindak pidana penggelapan yang memanfaatkan jabatannya dalam sistem pemerintahan untuk mempermudah melakukan tindak pidana penggelapan maka tindakannya tersebut dikenakan undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001.

Pada pasal 8 disebutkan bahwa *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”*.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, dapat dilihat dari unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai negeri (PNS) atau orang selain pegawai negeri yang diberikan tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;

3. Menggelapkan ataupun membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
4. Uang atau surat berharga;
5. Yang disimpan karena jabatannya;⁷¹

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Terjadi di Perusahaan Swasta (Studi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 411/B/2019/PN Mks Tahun 2019)

1. Kasus Posisi

ONE AGUNG SANJAYA bekerja disebuah perusahaan PT. Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar, ONE AGUNG SANJAYA memiliki jabatan sebagai kepala gudang dari PT. Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang, ONE AGUNG SANJAYA bertanggungjawab sebagai Area Sales dan Logistik Manager sesuai Surat Keputusan Direktur PT. Remaja Jaya Mobilindo Nomor: 086/SK/DIREKTUR/RJM /II/2018 tanggal 9 Februari 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap keluar masuknya mobil dari gudang Honda Remaja Jaya Makassar yang berada di Kima ataupun digudang panaikang dengan tujuan DO ke cabang Honda Remaja Jaya ataupun display cabang dan pameran, bertanggungjawab terhadap target faktur dan target penjualan serta stop opname mobil yang

⁷¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Hlm. 57.

berada digudang dengan gaji sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Mekanisme penjualan unit mobil di Honda Remaja Jaya yaitu mobil yang dibutuhkan oleh Honda Remaja Jaya dikeluarkan dari Gudang Ekspedisi di Kima dengan menggunakan surat izin keluar kendaraan kemudian mobil disimpan digudang Honda Remaja Jaya Cab. Panaikang kemudian setiap kendaraan didata oleh pihak Logistik Honda Remaja Jaya jika Sales telah menjual kemudian hasil penjualan diberikan ke Kasir Cab. Panaikang setelah itu mobil diproses untuk dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Keuangan dan Kepala Logistik untuk kendaraan yang dibayar lunas, Untuk penjualan mobil dengan kredit pihak Kepala Keuangan dan Kepala Logistik dapat mengeluarkan mobil jika Uang Muka telah di terima kasir dan Kontrak telah ditanda tangani oleh customer dan pembiayaan, BSTK (Bukti Serah Terima Kendaraan) dari sistem programming yang dibuat oleh Honda Remaja Jaya yaitu HOXWARE dapat dicetak jika persyaratan yang diinginkan telah terpenuhi yaitu bukti pembayaran lunas dari kasir untuk pembelian mobil secara cash sedangkan penjualan secara kredit pihak customer harus sudah membayar uang muka dan telah menandatangani kontrak kredit dengan pembiayaan.

ONE AGUNG SANJAYA dengan mengetahui dan memberikan kesempatan kepada Ik.FAJAR SAMIUN TANAWALI dan Ik.FEBRYANTO untuk mengeluarkan mobil dari gudang tanpa adanya pembayaran yang

diterima oleh PT.Honda Remaja Jaya sebagai tanda pembelian dan adanya pengambilan uang discount dari konsumen terkait kebijakan perusahaan memberikan potongan harga mobil kepada konsumen, dengan nilai fee Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa ONE AGUNG.

ONE AGUNG memiliki kewenangan agar kendaraan/mobil tersebut tidak dikeluarkan dari gudang dan tidak melarang Ik.Fajar untuk melakukan hal tersebut namun terdakwa ONE AGUNG malah membantu karena terdakwa ONE AGUNG SANJAYA mengharapkan keuntungan dari pemotongan discount. ONE AGUNG SANJAYA juga menerima uang dari Ik.FAJAR kurang lebih sebesar Rp.26.650.000 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan pribadi ONE AGUNG SANJAYA. Ada 6 (enam) unit mobil yang keluar dari gudang dipanaikang yang belum diterima pembayarannya, dan hal ini atas sepengetahuan ONE AGUNG SANJAYA.

2. Identitas Terdakwa

Nama : **ONE AGUNG SANJAYA**

Tempat lahir : Surabaya

Umur/tgl lahir : 39 tahun / 17 Mei 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Rumbia RT.020 Kel.Sidomulyao Kec.samarinda Ilir
Samarinda

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : S1

3. Dakwaan

Alternatif

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ONE AGUNG SANJAYA** bersama-sama dengan Ik.FAJAR SAMIUN TANAWALI dan Ik. FEBRYANTO (penuntutan terpisah) pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus 2017 sampai bulan April 2018 atau setidaknya sekitar bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018 bertempat di kantor PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar atau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, baik sebagai orang

yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April 2018 telah dilakukan audit internal oleh PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar dan ditemukan adanya mobil yang terjual dan uang yang masuk ke kas bagian keuangan tidak sesuai/tidak cocok sehingga menimbulkan kerugian pada pihak PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang.
- Bahwa pengecekan atau audit yang dilakukan dengan cara memeriksa stok unit berdasarkan data, namun ternyata unit tersebut telah keluar dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan, selain itu Surat Pesanan Kendaraan (SPK) yang seharusnya sudah menjadi nota penjualan tetapi ternyata belum jadi nota penjualan lalu dicek lagi tanda terima uang muka sementara yang ada di SPK biasanya jika tanda terima uang muka sementara ada nominalnya dicek ke kasir tetapi tidak ada.
- Bahwa terdakwa ONE AGUNG sebagai Area Sales dan Logistik Manager sesuai Surat Keputusan Direktur PT. Remaja Jaya

Mobilindo Nomor: 086/SK/DIREKTUR/RJM /II/2018 tanggal 9 Februari 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap keluar masuknya mobil dari gudang Honda Remaja Jaya Makassar yang berada di Kima ataupun digudang panaikang dengan tujuan DO ke cabang Honda Remaja Jaya ataupun display cabang dan pameran, bertanggungjawab terhadap target faktur dan target penjualan serta stop opname mobil yang berada digudang dengan gaji sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan.

- Bahwa mekanisme penjualan unit mobil di Honda Remaja Jaya yaitu mobil yang dibutuhkan oleh Honda Remaja Jaya dikeluarkan dari Gudang Ekspedisi di Kima dengan menggunakan surat izin keluar kendaraan kemudian mobil disimpan digudang Honda Remaja Jaya Cab. Panaikang kemudian setiap kendaraan didata oleh pihak Logistik Honda Remaja Jaya jika Sales telah menjual kemudian hasil penjualan diberikan ke Kasir Cab. Panaikang setelah itu mobil diproses untuk dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Keuangan dan Kepala Logistik untuk kendaraan yang dibayar lunas, Untuk penjualan mobil dengan kredit pihak Kepala Keuangan dan Kepala Logistik dapat mengeluarkan mobil jika Uang Muka telah di terima kasir dan Kontrak telah ditanda tangani oleh customer dan pembiayaan,

BSTK (Bukti Serah Terima Kendaraan) dari sistem programming yang dibuat oleh Honda Remaja Jaya yaitu HOXWARE dapat dicetak jika persyaratan yang diinginkan telah terpenuhi yaitu bukti pembayaran lunas dari kasir untuk pembelian mobil secara cash sedangkan penjualan secara kredit pihak customer harus sudah membayar uang muka dan telah menandatangani kontrak kredit dengan pembiayaan.

- Bahwa terdakwa ONE AGUNG SANJAYA bersama-sama dengan Ik.FAJAR SAMIUN TANAWALI dan Ik.FEBRYANTO (penuntutan terpisah) melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa ONE AGUNG mengetahui dan memberikan kesempatan kepada Ik.FAJAR SAMIUN TANAWALI dan Ik.FEBRYANTO (penuntutan terpisah) untuk mengeluarkan mobil dari gudang tanpa adanya pembayaran yang diterima oleh PT.Honda Remaja Jaya sebagai tanda pembelian dan adanya pengambilan uang discount dari konsumen terkait kebijakan perusahaan memberikan potongan harga mobil kepada konsumen, dengan nilai fee Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa ONE AGUNG.
- Bahwa terdakwa ONE AGUNG memiliki kewenangan agar kendaraan/mobil tersebut tidak dikeluarkan dari gudang dan tidak

melarang Ik.Fajar untuk melakukan hal tersebut namun terdakwa ONE AGUNG malah membantu karena terdakwa ONE AGUNG mengharapkan keuntungan dari pemotongan discount.

- Bahwa terdakwa ONE AGUNG menerima uang dari Ik.FAJAR (penuntutan terpisah) kurang lebih sebesar Rp.26.650.000 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa ONE AGUNG.
- Bahwa ada 6 (enam) unit mobil yang keluar dari gudang dipanaikang yang belum diterima pembayarannya, dan hal ini atas sepengetahuan terdakwa ONE AGUNG yaitu:
 1. Pada tanggal 5 Pebruari 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.5 CVT, warna merah keluar dengan alasan DO (delievery order) Outlet Maros tidak ketahui terdakwa karena tidak berada di Kantor Honda Remaja Jaya di Panaikang Kota Makassar namun terhadap surat izin keluar kendaraan dari gudang Honda Remaja Panaikang ditandatangani oleh sdr. Megy selaku staf saya.
 2. Pada tanggal 26 Pebruari 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil Honda MOBILIO E CVT, warna Marine Purple keluar dengan alasan DO (delievery order) Outlet Maros yang surat izin keluarnya terdakwa yang tanda tangani kemudian dikendarai

oleh sdr. SUNARYA SUNARDI untuk dibawa ke Outlet Maros. Terkait dengan pembayaran terdakwa telah konfirmasi dengan lk. FAJAR selaku Chief Outlet Maros yang dijawab oleh lk FAJAR (penuntutan terpisah) belum adanya pembayaran dari konsumen.

3. Pada 13 Maret 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil CIVIC 1.5 E CVT, warna Merah dengan alasan DO (delievery order) Outlet Maros yang surat izin keluarnya terdakwa yang tanda tangani kemudian dikendarai oleh sdr. MOH. SYAHBAN untuk dibawa ke Outlet Maros. Terkait dengan pembayaran terdakwa telah konfirmasi dengan lk FAJAR selaku Chief Outlet Maros yang dijawab oleh .k FAJAR (penuntutan terpisah) belum adanya pembayaran dari konsumen.
4. Pada 2 April 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil CR-V 1.5 CVT PRESTIGE dengan alasan DO (delievery order) Outlet Maros yang surat izin keluarnya terdakwa yang tanda tangani kemudian dikuasai oleh lk.FAJAR (penuntutan terpisah).Terkait dengan pembayaran terdakwa telah konfirmasi oleh lk.FEBRIANTO (penuntutan terpisah) bahwa pembayaran untuk mobil tersebut telah dilunasi oleh konsumen atas nama sdr. AMELIA RIFAI dengan nilai Rp. 497.000.000,-

(empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan sales atas nama sdr.NURMAISTIKA.

5. Pada 7 April 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil HRV 1.8 MUGEN, warna kuning dengan alasan alasan DO (delievery order) Cabang Riburane yang surat izin keluarnya tersangka yang tanda tangani yang dimohonkan oleh sdr.A HENDRA

6. Pada 11 April 2018 terdakwa kemudian mengetahui perihal uang penjualan CRV 1.5 CVT PRESTIGE, dengan nilai Rp. 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang digunakan oleh Ik. FAJAR dan Ik.FEBRYANTO (penuntutan terpisah) untuk menutupi pembayaran 2 (dua) unit mobil dengan rincian Honda BRV Rp. 230.500.000,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang muka CRV sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) serta sisanya tersimpan direkening kantor sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), jadi total uang penjualan CRV yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya adalah Rp. 418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **ONE AGUNG SANJAYA**, PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.488.600.000 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa ONE AGUNG hanya menggunakan uang hasil penjualan unit dan tidak dapat mempertanggungjawabkan sebesar Rp.26.650.000 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **ONE AGUNG SANJAYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 KUHP.

ATAU
KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ONE AGUNG SANJAYA** bersama-sama dengan Ik.FAJAR SAMIUN TANAWALI dan Ik. FEBRYANTO (penuntutan terpisah) pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus 2017 sampai bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018 bertempat di kantor PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar atau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, baik sebagai orang yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April 2018 telah dilakukan audit internal oleh PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar dan ditemukan adanya mobil yang terjual dan uang yang masuk ke kas bagian keuangan tidak sesuai/tidak cocok sehingga menimbulkan kerugian pada pihak PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang.
- Bahwa pengecekan atau audit yang dilakukan dengan cara memeriksa stok unit berdasarkan data, namun ternyata unit tersebut telah keluar dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan, selain itu Surat Pesanan Kendaraan (SPK) yang seharusnya sudah menjadi nota penjualan tetapi ternyata belum jadi nota penjualan lalu dicek lagi tanda terima uang muka sementara yang ada di SPK biasanya jika tanda terima uang muka sementara ada nominalnya dicek ke kasir tetapi tidak ada.

- Bahwa terdakwa ONE AGUNG sebagai Area Sales dan Logistik Manager sesuai Surat Keputusan Direktur PT. Remaja Jaya Mobilindo Nomor: 086/SK/DIREKTUR/RJM /II/2018 tanggal 9 Februari 2018 mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap keluar masuknya mobil dari gudang Honda Remaja Jaya Makassar yang berada di Kima ataupun digudang panaikang dengan tujuan DO ke cabang Honda Remaja Jaya ataupun display cabang dan pameran, bertanggungjawab terhadap target faktur dan target penjualan serta stop opname mobil yang berada digudang dengan gaji sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan.
- Bahwa mekanisme penjualan unit mobil di Honda Remaja Jaya yaitu mobil yang dibutuhkan oleh Honda Remaja Jaya dikeluarkan dari Gudang Ekspedisi di Kima dengan menggunakan surat izin keluar kendaraan kemudian mobil disimpan digudang Honda Remaja Jaya Cab. Panaikang kemudian setiap kendaraan didata oleh pihak Logistik Honda Remaja Jaya jika Sales telah menjual kemudian hasil penjualan diberikan ke Kasir Cab. Panaikang setelah itu mobil diproses untuk dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Keuangan dan Kepala Logistik untuk kendaraan yang dibayar lunas, Untuk penjualan mobil dengan kredit pihak Kepala Keuangan dan Kepala Logistik dapat

mengeluarkan mobil jika Uang Muka telah di terima kasir dan Kontrak telah ditanda tangani oleh customer dan pembiayaan, BSTK (Bukti Serah Terima Kendaraan) dari sistem programming yang dibuat oleh Honda Remaja Jaya yaitu HOXWARE dapat dicetak jika persyaratan yang diinginkan telah terpenuhi yaitu bukti pembayaran lunas dari kasir untuk pembelian mobil secara cash sedangkan penjualan secara kredit pihak customer harus sudah membayar uang muka dan telah menandatangani kontrak kredit dengan pembiayaan.

- Bahwa terdakwa ONE AGUNG SANJAYA bersama-sama dengan Ik.FAJAR SAMIUN TANAWALI dan Ik.FEBRYANTO (penuntutan terpisah) melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa ONE AGUNG mengetahui dan memberikan kesempatan kepada Ik. FAJAR SAMIUN TANAWALI dan Ik.FEBRYANTO (penuntutan terpisah) untuk mengeluarkan mobil dari gudang tanpa adanya pembayaran yang diterima oleh PT.Honda Remaja Jaya sebagai tanda pembelian dan adanya pengambilan uang discount dari konsumen terkait kebijakan perusahaan memberikan potongan harga mobil kepada konsumen, dengan nilai fee Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa ONE AGUNG.

- Bahwa terdakwa ONE AGUNG memiliki kewenangan agar kendaraan/mobil tersebut tidak dikeluarkan dari gudang dan tidak melarang Ik.Fajar untuk melakukan hal tersebut namun terdakwa ONE AGUNG malah membantu karena terdakwa ONE AGUNG mengharapkan keuntungan dari pemotongan discount.
- Bahwa terdakwa ONE AGUNG menerima uang dari Ik.FAJAR (penuntutan terpisah) kurang lebih sebesar Rp.26.650.000 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa ONE AGUNG.
- Bahwa ada 6 (enam) unit mobil yang keluar dari gudang dipanaikang yang belum diterima pembayarannya, dan hal ini atas sepengetahuan terdakwa ONE AGUNG yaitu:
 - 1) Pada tanggal 5 Pebruari 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1.5 CVT, warna merah keluar dengan alasan DO (delievery order) Outlet Maros tidak ketahui terdakwa karena tidak berada di Kantor Honda Remaja Jaya di Panaikang Kota Makassar namun terhadap surat izin keluar kendaraan dari gudang Honda Remaja Panaikang ditandatangani oleh sdr. Megy selaku staf saya.
 - 2) Pada tanggal 26 Pebruari 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil Honda MOBILIO E CVT, warna Marine Purple keluar dengan

alasan DO (delivery order) Outlet Maros yang surat izin keluarnya terdakwa yang tanda tangani kemudian dikendarai oleh sdr. SUNARYA SUNARDI untuk dibawa ke Outlet Maros. Terkait dengan pembayaran terdakwa telah konfirmasi dengan lk. FAJAR selaku Chief Outlet Maros yang dijawab oleh lk FAJAR (penuntutan terpisah) belum adanya pembayaran dari konsumen.

- 3) Pada 13 Maret 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil CIVIC 1.5 E CVT, warna Merah dengan alasan DO (delivery order) Outlet Maros yang surat izin keluarnya terdakwa yang tanda tangani kemudian dikendarai oleh sdr. MOH. SYAHBAN untuk dibawa ke Outlet Maros. Terkait dengan pembayaran terdakwa telah konfirmasi dengan lk FAJAR selaku Chief Outlet Maros yang dijawab oleh lk FAJAR (penuntutan terpisah) belum adanya pembayaran dari konsumen
- 4) Pada 2 April 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil CR-V 1.5 CVT PRESTIGE dengan alasan DO (delivery order) Outlet Maros yang surat izin keluarnya terdakwa yang tanda tangani kemudian dikuasai oleh lk. FAJAR (penuntutan terpisah). Terkait dengan pembayaran terdakwa telah konfirmasi oleh lk. FEBRIANTO (penuntutan terpisah) bahwa pembayaran untuk mobil tersebut telah dilunasi oleh

konsumen atas nama sdr. AMELIA RIFAI dengan nilai Rp. 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan sales atas nama sdr.NURMAISTIKA.

- 5) Pada 7 April 2018 terhadap 1 (satu) unit mobil HRV 1.8 MUGEN, warna kuning dengan alasan alasan DO (delievery order) Cabang Riburane yang surat izin keluarnya tersangka yang tanda tangani yang dimohonkan oleh sdr.A HENDRA
- 6) Pada 11 April 2018 terdakwa kemudian mengetahui perihal uang penjualan CRV 1.5 CVT PRESTIGE, dengan nilai Rp. 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang digunakan oleh lk. FAJAR dan lk.FEBRYANTO (penuntutan terpisah) untuk menutupi pembayaran 2 (dua) unit mobil dengan rincian Honda BRV Rp. 230.500.000,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang muka CRV sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) serta sisanya tersimpan direkening kantor sebesar Rp. 78.500.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), jadi total uang penjualan CRV yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya adalah Rp. 418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **ONE AGUNG SANJAYA**, PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.488.600.000 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa ONE AGUNG hanya menggunakan uang hasil penjualan unit dan tidak dapat mempertanggungjawabkan sebesar Rp.26.650.000 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **ONE AGUNG SANJAYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 KUHP.

4. Tuntutan

Pokok-pokok tuntutan :

- 1) Dengan mengingat Pasal pasal 374 KUHP Jo. Pasal 56 Jo. Pasal 64 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 Jo. Pasal 64 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami memohon agar terdakwa ONE AGUNG SANJAYA dipatuhi.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 3) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Amar Putusan

M E N G A D I L I:

- 1) Menyatakan terdakwa ONE AGUNG SANJAYA, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut"
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONE AGUNG SANJAYA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) rangkap berkas masing-masing an. costumer.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pembayaran piutang dari Febryanto
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Febryanto
 - 1 (satu) lembar surat perekaman an.Febryanto
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Fajar Samiun
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari One Agung
 - 1 (satu) lbr fotocopy KTP an.One Agung
 - 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan

- Berita Acara Stok Opname

(terlampir dalam berkas)

- 6) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

6. Analisis Penulis

Posisi kasus yang telah diuraikan diatas merujuk pada dakwaan jaksa penuntut umum yang memilih dakwaan alternatif yakni pasal 374 KUHP Jo. Pasal 56 Jo. Pasal 64 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 Jo. Pasal 64 KUHP serta tuntutan jaksa penuntut umum yakni dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. Apabila kita melihat sanksi dalam KUHP, sanksi maksimal untuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan yakni 5 (lima) tahun penjara.

Analisis penulis bahwasanya, tuntutan jaksa penuntut umum terlalu rendah yakni hanya 2 tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri merupakan tindak pidana dengan pemberatan. Pemberatan itu sendiri bermakna bahwasanya pelaku tindak pidana seharusnya diberikan efek jera atas tindak pidana yang dia lakukan karena adanya alasan-alasan pemberatan tertentu.

Tuntutan yang rendah ini juga membuat hakim terbatas dalam menjatuhkan pidana penjara bagi tersangka ONE AGUNG SANJAYA, menurut wawancara penulis dengan Muhammad Salam Giri Basuki SH., MH. Yang bertindak sebagai hakim ketua dalam perkara tersebut,

menurutnya para majelis hakim setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan dengan menggunakan keyakinan hakim maka majelis sepakat menjatuhkan pidana pasal 374 KUHP yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Serta majelis tahu bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh ONE AGUNG SANJAYA ialah tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dimana tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang bermakna memberikan hukuman yang lebih dari tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok. Maka dari itu, hasil dari musyawarah majelis, kami sepakat memberikan hukuman yang maksimal bagi ONE AGUNG SANJAYA yakni mengikut dengan tuntutan jaksa penuntut umum yakni pidana 2 (dua) tahun penjara”.

Menurut penulis bahwasanya hakim bisa saja memutus perkara diatas tuntutan jaksa penuntut umum, karena tidak ada satupun aturan dalam KUHAP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang melarang hakim untuk memutus perkara diatas tuntutan jaksa penuntut umum. Kemudian yang menjadi hal yang terlarang ialah apabila hakim memvonis sanksi diatas hukuman maksimal yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di luar dari itu bahwasanya hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara pidana, hakim diberikan kemerdekaan dalam

menafsirkan suatu peristiwa serta tidak bisa diintervensi dalam memutuskan sebuah perkara pidana.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara One Agung Sanjaya

1. Pertimbangan Hakim

Muhammad Salam Giri Basui dalam wawancara menyebutkan bahwasanya apabila proses pemeriksaan pada persidangan telah selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang benar dan tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Maka dari itu hakim di tuntut untuk menelaah terlebih dahulu atas kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan di sertai keyakinan dengan menggunakan metode penafsiran, kontruksi, dan mempertimbangkan berbagai keadaan sosio-kultural untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang.

Hakim kelahiran Magelang itu dalam wawancaranya juga menyebutkan bahwasanya hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak serta merta dalam mengambil keputusan tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga

sudah jelas tercentum bahwasanya Hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu telah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan sebuah tindak pidana. Oleh Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim juga didasarkan pada bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.⁷²

Sehubungan dengan hal itu demi keadilan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara NO.411/B/2019/PN.Mks Tahun 2019 dan setelah mendengar keterangan-keterangan saksi yang dihadapkan di persidangan serta adanya alat bukti surat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa ONE AGUNG SANJAYA dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- 2) Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan diperhadapkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) rangkap berkas masing-masing atas nama

⁷² Muhammad Salam Giri Basuki (41 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, Wawancara, Makassar, 12 Desember 2019.

costumer. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pembayaran piutang dari Febryanto, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Febryanto, 1 (satu) lembar surat perekaman atas nama Febryanto, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Fajar Samiun, (satu) lembar surat pernyataan dari One Agung, 1 (satu) lbr fotocopy KTP an. One Agung, 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Stok Opname. Atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya.

- 3) Bahwa benar sebagaimana dakwaan dalam persidangan ini menggunakan dakwaan alternatif, dimana penuntut umum hanya boleh membuktikan satu pasal pada hakim, dan hakim dalam persidangan baik dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa melihat dengan keyakinan hakim bahwa pasal yang terbukti adalah pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Menurut pertimbangan hakim bahwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan pengampunan pidana serta terdakwa ONE AGUNG SANJAYA melakukan tindak pidana dengan sengaja.
- 5) Bahwa benar dalam persidangan telah terbukti ONE AGUNG SANJAYA berada dibawah perintah dari STEVEN KURNIAWAN, dimana terdakwa ONE AGUNG SANJAYA hanya dapat mengeluarkan mobil dari gudang menggunakan surat izin keluar kendaraan. Jika kendaraan tersebut sudah memenuhi persyaratan

pengeluaran kendaraan yaitu *customer* telah dibayar lunas untuk pembelian *cash* atau *customer* telah membayar uang muka dan tanda tangan kontrak kredit untuk pembelian secara kredit.

- 6) Bahwa benar dalam persidangan terdakwa mengakui kesalahannya dan berkelakuan baik serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- 7) Bahwa betul dalam persidangan terbukti bahwa kerugian yang dialami oleh pihak HONDA REMAJA JAYA yaitu Rp. 1.335.700.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang dinikmati oleh ONE AGUNG SANJAYA hanya Rp.26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Atas keterangan tersebut diatas terdakwa membenarkannya
- 8) Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan hati nuraninya serta berada pada sikap pertengahan dalam melihat kerugian yang dialami oleh pihak HONDA REMAJA JAYA serta yang dinikmati oleh ONE AGUNG SANJAYA.

Menimbang : bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang terungkap, sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini dengan dakwaan Dakwaan Alternatif Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang : bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal akan dibuktikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja baik orang maupun Badan Hukum sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini “barang siapa” yang dimaksudkan berwujud orang dan menunjuk kepada terdakwa ONE AGUNG SANJAYA yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya baik dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini. Selain itu dalam persidangan para terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah dewasa berakal sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada setiap persidangan selalu menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan

bersedia untuk mengikuti persidangan dan mengaku bahwa terdakwa ONE AGUNG SANJAYA telah menjual beberapa unit kendaraan namun uang pembayaran tersebut dialihkan ke unit sebelumnya dimana uang hasil penjualan sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa ONE AGUNG SANJAYA , sehingga PT.Remaja Jaya Mobilindo mengalami kerugian dan terdakwa ONE AGUNG SANJAYA menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa terhadap terdakwa telah membenarkan kejadian tersebut dan keterangan para saksi telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur kedua : “dengan sengaja dan melawan hukum”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi STEVEN KURNIAWAN, saksi LENNY, saksi FINA AMELIA dan saksi MEGGY LAURENCE, saksi IREN EMBA, saksi FAJAR SAMIUN, saksi FEBRYANTO serta keterangan terdakwa ONE AGUNG SANJAYA dan dihubungkan dengan barang bukti, telah terungkap dipersidangan bahwa sekitar bulan Agustus 2017 sampai bulan April 2018 bertempat di kantor PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar terdakwa ONE

AGUNG SANJAYA sebagai Chief Outlet Honda Remaja Jaya Maros bersama-sama dengan Ik. FAJAR SAMIUN dan Ik. FEBRYANTO (penuntutan terpisah), pada bulan April 2018 telah dilakukan audit internal oleh PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar dan ditemukan adanya mobil yang terjual dan uang yang masuk ke kas bagian keuangan tidak sesuai/tidak cocok sehingga menimbulkan kerugian pada pihak PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang. Bahwa cara saksi FAJAR mengalihkan dan mengambil uang hasil penjualan unit kendaraan yaitu apabila costumer melakukan pembayaran secara setor tunai, maka saksi FAJAR langsung mengkoordinasikan kepada kasir bahwa ada costumer yang melakukan pembayaran, namun pembayaran atas nama costumer pertama tersebut saksi FAJAR alihkan kepada costumer kedua/lainnya tanpa sepengetahuan costumer sebelumnya/pertama dan kasir, sehingga uang dari costumer sebelumnya/pertama beralih kepada costumer lainnya/kedua yang mana sebelumnya uang hasil jualan unit kendaraan telah saksi FAJAR gunakan, dan terdakwa FAJAR sendiri yang mengatur form DO/pembayaran costumer sehingga pihak keuangan tidak mengetahui siapa costumer yang melakukan pembayaran. Bahwa terdakwa FAJAR SAMIUN bersama-sama

dengan lk. FEBRYANTO dan terdakwa .ONE AGUNG SANJAYA (penuntutan terpisah) melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi FAJAR SAMIUN bersama-sama lk.FEBRYANTO (penuntutan terpisah) menerima uang tanda jadi (DP) dan uang tunai (Cash) dari customer untuk pembelian unit mobil Honda milik Honda Remaja Jaya kemudian terdakwa FAJAR SAMIUN bersama lk. FEBRYANTO (penuntutan terpisah) melapor kepada pihak logistik Honda Remaja Jaya bahwa ada customer yang berencana membeli mobil namun harus melihat barang di Maros sehingga pihak logistik memperbolehkan mobil keluar dari gudang Honda Remaja Jaya yang diketahui oleh terdakwa .ONE AGUNG (penuntutan terpisah) sebagai orang yang bertugas mengawasi masuk dan keluarnya mobil dari gudang dan melaporkan status mobil tersebut ke bagian keuangan, dengan mengeluarkan surat izin keluar kendaraan, namun hal tersebut tidak dilaporkan karena terdakwa .ONE AGUNG SANJAYA (penuntutan terpisah) bekerjasama dan mendapat fee dari keuntungan pemotongan discount dari saksi FAJAR SAMIUN dan lk. FEBRYANTO (penuntutan terpisah) dan hanya menyampaikan ke bagian keuangan kalau mobil telah terjual tetapi bukti pembayaran terhadap mobil tersebut belum juga diberikan kepada bagian

Keuangan. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT.Remaja Jaya Mobilindo. Bahwa atas perbuatan saksi FAJAR SAMIUN TANAWALI, PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.488.600.000 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), namun saksi FAJAR hanya menggunakan uang hasil penjualan unit dan tidak dapat mempertanggungjawabkan sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Bahwa terhadap terdakwa telah membenarkan kejadian tersebut dan keterangan para saksi telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi STEVEN KURNIAWAN, saksi LENNY, saksi FINA AMELIA dan saksi MEGGY LAURENCE, saksi IREN EMBA, saksi ONE AGUNG SANJAYA, saksi FEBRYANTO serta keterangan saksi FAJAR

SAMIUN dan dihubungkan dengan barang bukti, telah terungkap dipersidangan Bahwa saksi FAJAR SAMIUN TANAWALI sebagai Chief Outlet Honda Remaja Jaya Maros bersama-sama dengan terdakwa .ONE AGUNG SANJAYA dan saksi FEBRYANTO (penuntutan terpisah), pada bulan April 2018 telah dilakukan audit internal oleh PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar dan ditemukan adanya mobil yang terjual dan uang yang masuk ke kas bagian keuangan tidak sesuai/tidak cocok sehingga menimbulkan kerugian pada pihak PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang. Bahwa cara terdakwa FAJAR mengalihkan dan mengambil uang hasil penjualan unit kendaraan yaitu apabila costumer melakukan pembayaran secara setor tunai, maka saksi FAJAR langsung mengkoordinasikan kepada kasir bahwa ada costumer yang melakukan pembayaran, namun pembayaran atas nama costumer pertama tersebut saksi FAJAR alihkan kepada costumer kedua/lainnya tanpa sepengetahuan costumer sebelumnya/pertama dan kasir, sehingga uang dari costumer sebelumnya/pertama beralih kepada costumer lainnya/ke dua yang mana sebelumnya uang hasil jualan unit kendaraan telah saksi FAJAR gunakan, dan saksi FAJAR (terdakwa dalam berkas perkara lain)sendiri yang mengatur form DO/pembayaran

costumer sehingga pihak keuangan tidak mengetahui siapa costumer yang melakukan pembayaran. Bahwa saksi FAJAR SAMIUN bersama-sama dengan lk. FEBRYANTO dan terdakwa .ONE AGUNG SANJAYA (penuntutan terpisah) melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi FAJAR SAMIUN bersama-sama lk.FEBRYANTO (penuntutan terpisah) menerima uang tanda jadi (DP) dan uang tunai (Cash) dari customer untuk pembelian unit mobil Honda milik Honda Remaja Jaya kemudian terdakwa FAJAR SAMIUN bersama lk. FEBRYANTO (penuntutan terpisah) melapor kepada pihak logistik Honda Remaja Jaya bahwa ada customer yang berencana membeli mobil namun harus melihat barang di Maros sehingga pihak logistik memperbolehkan mobil keluar dari gudang Honda Remaja Jaya yang diketahui oleh terdakwa .ONE AGUNG (penuntutan terpisah) sebagai orang yang bertugas mengawasi masuk dan keluarnya mobil dari gudang dan melaporkan status mobil tersebut ke bagian keuangan, dengan mengeluarkan surat izin keluar kendaraan, namun hal tersebut tidak dilaporkan karena lk.ONE AGUNG (penuntutan terpisah) bekerjasama dan mendapat fee dari keuntungan pemotongan discount dari terdakwa FAJAR SAMIUN dan lk. FEBRYANTO (penuntutan terpisah) dan hanya menyampaikan ke bagian keuangan kalau

mobil telah terjual tetapi bukti pembayaran terhadap mobil tersebut belum juga diberikan kepada bagian Keuangan. Bahwa atas perbuatan saksi FAJAR SAMIUN TANAWALI, PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.488.600.000 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), namun saksi FAJAR hanya menggunakan uang hasil penjualan unit dan tidak dapat mempertanggungjawabkan sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah). Bahwa terhadap terdakwa telah membenarkan kejadian tersebut dan keterangan para saksi telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi STEVEN KURNIAWAN, saksi LENNY, saksi FINA AMELIA dan saksi MEGGY LAURENCE, saksi IREN EMBA, saksi ONE AGUNG SANJAYA, saksi FEBRYANTO serta keterangan terdakwa

FAJAR SAMIUN dan dihubungkan dengan barang bukti, telah terungkap dipersidangan. Bahwa saksi FAJAR SAMIUN TANAWALI sebagai Chief Outlet Honda Remaja Jaya Maros (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa .ONE AGUNG SANJAYA dan Ik. FEBRYANTO (penuntutan terpisah), pada bulan April 2018 telah dilakukan audit internal oleh PT. Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang Kota Makassar dan ditemukan adanya mobil yang terjual dan uang yang masuk ke kas bagian keuangan tidak sesuai/tidak cocok sehingga menimbulkan kerugian pada pihak PT. Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang. Bahwa saksi FAJAR melakukan perbuatan tersebut dari bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018 dengan cara mengalihkan dan mengambil uang hasil penjualan unit kendaraan yaitu apabila customer melakukan pembayaran secara setor tunai, maka saksi FAJAR langsung mengkoordinasikan kepada kasir bahwa ada customer yang melakukan pembayaran, namun pembayaran atas nama customer pertama tersebut saksi FAJAR alihkan kepada customer kedua/lainnya tanpa sepengetahuan customer sebelumnya/pertama dan kasir, sehingga uang dari customer sebelumnya/pertama beralih kepada customer lainnya/kedua yang mana sebelumnya uang hasil jualan unit kendaraan telah

saksi FAJAR gunakan, dan terdakwa FAJAR sendiri yang mengatur form DO/pembayaran costumer sehingga pihak keuangan tidak mengetahui siapa costumer yang melakukan pembayaran. Bahwa saksi FAJAR SAMIUN(berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan lk. FEBRYANTO dan terdakwa ONE AGUNG SANJAYA (penuntutan terpisah) melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi FAJAR SAMIUN bersama-sama lk.FEBRYANTO (penuntutan terpisah) menerima uang tanda jadi (DP) dan uang tunai (Cash) dari customer untuk pembelian unit mobil Honda milik Honda Remaja Jaya kemudian saksi FAJAR SAMIUN bersama lk. FEBRYANTO (penuntutan terpisah) melapor kepada pihak logistik Honda Remaja Jaya bahwa ada customer yang berencana membeli mobil namun harus melihat barang di Maros sehingga pihak logistik membolehkan mobil keluar dari gudang Honda Remaja Jaya yang diketahui oleh terdakwa .ONE AGUNG (penuntutan terpisah) sebagai orang yang bertugas mengawasi masuk dan keluarnya mobil dari gudang dan melaporkan status mobil tersebut ke bagian keuangan, dengan mengeluarkan surat izin keluar kendaraan, namun hal tersebut tidak dilaporkan karena lk.ONE AGUNG (penuntutan terpisah) bekerjasama dan mendapat fee dari keuntungan pemotongan discount dari saksi

FAJAR SAMIUN dan Ik. FEBRYANTO (penuntutan terpisah) dan hanya menyampaikan ke bagian keuangan kalau mobil telah terjual tetapi bukti pembayaran terhadap mobil tersebut belum juga diberikan kepada bagian Keuangan.

Bahwa terhadap terdakwa telah membenarkan kejadian tersebut dan keterangan para saksi telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan

Unsur kelima : “baik sebagai pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi STEVEN KURNIAWAN, saksi LENNY, saksi FINA AMELIA dan saksi MEGGY LAURENCE, saksi IREN EMBA, saksi FAJAR SAMIUN, saksi FEBRYANTO serta keterangan terdakwa ONE AGUNG SANJAYA dan dihubungkan dengan barang bukti, telah terungkap dipersidangan Bahwa saksi FAJAR SAMIUN TANAWALI sebagai Chief Outlet Honda Remaja Jaya Maros

bersama-sama dengan terdakwa .ONE AGUNG SANJAYA dan
lk. FEBRYANTO (penuntutan terpisah), pada bulan April 2018
telah dilakukan audit internal oleh PT.Remaja Jaya Mobilindo
Cabang Panaikang Kota Makassar dan ditemukan adanya mobil
yang terjual dan uang yang masuk ke kas bagian keuangan tidak
sesuai/tidak cocok sehingga menimbulkan kerugian pada pihak
PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang. Bahwa saksi
FAJAR melakukan perbuatan tersebut dari bulan Agustus tahun
2017 sampai dengan bulan April tahun 2018 dengan cara
mengalihkan dan mengambil uang hasil penjualan unit
kendaraan yaitu apabila costumer melakukan pembayaran secara
setor tunai, maka terdakwa saksi langsung mengkoordinasikan
kepada kasir bahwa ada costumer yang melakukan pembayaran,
namun pembayaran atas nama costumer pertama tersebut saksi
FAJAR alihkan kepada costumer kedua/lainnya tanpa
sepengetahuan costumer sebelumnya/pertama dan kasir,
sehingga uang dari costumer sebelumnya/pertama beralih
kepada costumer lainnya/kedua yang mana sebelumnya uang
hasil jualan unit kendaraan telah saksi FAJAR gunakan, dan
saksi FAJAR sendiri yang mengatur form DO/pembayaran
costumer sehingga pihak keuangan tidak mengetahui siapa
costumer yang melakukan pembayaran. Bahwa saksi FAJAR

SAMIUN bersama-sama dengan lk. FEBRYANTO dan terdakwa .ONE AGUNG SANJAYA (penuntutan terpisah) melakukan perbuatan tersebut dengan cara saksi FAJAR SAMIUN bersama-sama lk.FEBRYANTO (penuntutan terpisah) menerima uang tanda jadi (DP) dan uang tunai (Cash) dari customer untuk pembelian unit mobil Honda milik Honda Remaja Jaya kemudian terdakwa FAJAR SAMIUN bersama lk. FEBRYANTO (penuntutan terpisah) melapor kepada pihak logistik Honda Remaja Jaya bahwa ada customer yang berencana membeli mobil namun harus melihat barang di Maros sehingga pihak logistik memperbolehkan mobil keluar dari gudang Honda Remaja Jaya yang diketahui oleh lk.ONE AGUNG (penuntutan terpisah) sebagai orang yang bertugas mengawasi masuk dan keluarnya mobil dari gudang dan melaporkan status mobil tersebut ke bagian keuangan, dengan mengeluarkan surat izin keluar kendaraan, namun hal tersebut tidak dilaporkan karena terdakwa .ONE AGUNG (penuntutan terpisah) bekerjasama dan mendapat fee dari keuntungan pemotongan discount dari saksi FAJAR SAMIUN dan lk. FEBRYANTO (penuntutan terpisah) dan hanya menyampaikan ke bagian keuangan kalau mobil telah terjual tetapi bukti pembayaran terhadap mobil tersebut belum juga diberikan kepada bagian Keuangan. Bahwa berdasarkan

data yang ditemukan oleh tim audit ada 7 (tujuh) unit kendaraan yang terjual melalui saksi FAJAR SAMIUN TANAWALI, namun tidak menyetorkan uangnya ke kas PT.Remaja Jaya Mobilindo/pembayarannya bermasalah yaitu sejak tanggal 5 Pebruari 2018 berupa 1 (satu) unit Honda HRV-S CVT warna merah, tanggal 26 Pebruari 2018 berupa mobil Honda Mobilio warna Marine Purple/ biru, tanggal 13 Maret 2018 berupa 1 (satu) unit mobil Honda Civic hatchback warna merah, tanggal 1 April 2018 berupa 1 (satu) unit mobil Honda HRV 1,8 Mugen warna merah, tanggal 2 April 2018 berupa 1 (satu) unit mobil CRV 1,5 warna putih, tanggal 6 April 2018 berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS CVT warna Kuning dan tanggal 16 April 2018 berupa 1 (satu) unit mobil BRV-E MT warna Putih.

Bahwa terhadap terdakwa telah membenarkan kejadian tersebut dan keterangan para saksi telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan/pengakuan terdakwa serta barang bukti yang ada dan satu sama lain saling berkaitan, maka kami berpendapat bahwa terdakwa ONE AGUNG SANJAYA telah terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374

KUHP Jo Pasal 55 Jo Pasal 64 KUHP dan sepatutnyalah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat mengingat selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana.

Menimbang : bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.488.600.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa ONE AGUNG SANJAYA mengakui menggunakan uang hasil penjualan unit sebesar Rp.26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang : bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh

Penuntut Umum berupa :

- 7 (tujuh) rangkap berkas masing-masing an. costumer.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pembayaran piutang dari Febryanto
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Febryanto
- 1 (satu) lembar surat perekaman an.Febryanto
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Fajar Samiun
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari One Agung
- 1 (satu) lbr fotocopy KTP an.One Agung
- 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan
- Berita Acara Stok Opname

Menimbang : bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Jo Pasal 64 KUHP serta peraturan yang bersangkutan.

2. Analisa Penulis

Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak serta merta. Dalam mengambil sebuah keputusan hakim harus memperhatikan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun seluruhnya tidak dituangkan kedalam putusan. Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga sudah jelas tercentum bahwasanya Hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu telah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan sebuah tindak pidana. Oleh Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim juga didasarkan pada bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa ONE AGUNG SANJAYA dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dengan mepertimbangkan kerugian yang dialami pihak PT. Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang kurang lebih sebesar Rp. 1.488.600.000 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa ONE AGUNG hanya menikmati sebesar Rp.26.650.000 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hakim dalam memberikan sanksi kepada ONE AGUNG SANJAYA mengambil sikap pertengahan dan menggunakan hati nurani hakim dengan pertimbangan melihat kerugian oleh pihak PT. Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang dan juga jumlah uang yang dinikmati oleh ONE AGUNG SANJAYA.

Analisis penulis bahwasanya, sanksi yang diberikan hakim masih kurang efektif, oleh karena hakim memilih pasal 374 KUHP dari dakwaan alternatif dari jaksa penuntut umum, maka bisa saja hakim memberikan sanksi pidana penjara lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jika kita melihat dari sudut pandang uang yang di nikmati oleh ONE AGUNG SANJAYA memang tidak seberapa banyak dari total kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan, akan tetapi nominal Rp.26.650.000 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) itu sepatutnya adalah kerugian yg besar pula bagi perusahaan.

Jika kita liat dari tanggung jawab yang diberikan kepada ONE AGUNG SANJAYA sebetulnya sangat besar serta sepadan dengan gaji perbulan yang dia terima yakni Rp.10.000.000; (Sepuluh Juta Rupiah), seharusnya dengan gaji sebesar itu secara pertimbangan sosiologis, tidak membuat ONE AGUNG SANJAYA untuk mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadanya.

Peran ONE AGUNG SANJAYA juga dinilai sangat vital dalam kelancaran tindak pidana ini, karena dia merupakan kepala gudang dimana

mobil tidak akan mudah keluar-masuk gudang tanpa persetujuan terdakwa. Maka dari itu sudah seharusnya ONE AGUNG SANJAYA dijatuhkan pidana yang dapat memberikan efek jera, karena kerugian sebanyak Rp. 1.488.600.000 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) itu tidak akan dialami oleh pihak PT. Remaja Jaya Mobilindo Cabang Panaikang tanpa peran vital dari ONE AGUNG SANJAYA.

Hal ini membuat penulis beranggapan bahwasanya pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sudah tepat akan masih kurang dalam memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya, berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 374. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud ialah :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang

dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.⁷³

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP hanya berlaku pada seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta. Adapun apabila yang melakukan tindak pidana penggelapan yang memiliki jabatan di ranah pemerintahan maka ia akan dikenakan Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 374 dalam KUHP hanyalah bentuk pemberatan dari pasal 372 KUHP yang merupakan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu apabila tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga jika pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.

B. Implementasi Penelitian

Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan hendaknya mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Serta bukan hanya bagi pelaku, akan tetapi bagi para orang-orang yang sedang memegang jabatan agar mereka berpikir lebih jauh lagi apabila ia hendak mengkhianati jabatan yang telah dipangkuhnya.

R. Soenarto mengatakan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini adalah perkara perdata, perusahaan dapat mengajukan gugatan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan. Akan tetapi apabila penyelesaian

⁷³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor Politeria : 1995), Hlm. 259

sengketa dalam rana perdata tersebut tidak dapat terselesaikan, maka jalur pidana disebut mampu untuk memberantas tindak pidana penggelapan dalam jabatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asyhadie, Zaeni. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta :Rajagrafindo Persada, 2016.

Anis, Ibrahim. Muntashir, Abdul Halim. dkk. (*Al-Mu`jam Al-Wasith*), Mesir : Dar Al-Ma`arif, 1972

Bahri Johan, Teuku Saiful. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018 .

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Apollo, 1998.

Effendi, Jonaedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2015.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`anul Karim Terjemahan Dan Tajwid*, Surakarta : Az-Zayadah, 2014.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2012.
- Marpaung, Leden. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Bandung : Tarsito, 1979.
- Marpaung, Laden. *Asas - Teori - Praktik - Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Marbun, Rocky. *Kiat Jitu menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta : Visimedia, 2011.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1984.
- Muhardi, R. Muhammad & S. Muhayana, Maman. *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.
- Pasek Diantha, I Mada. *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2016
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco, 1981.
- Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017.
- Soerodibroto, R. Soenarto. *KUKHP dan KUHP*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Syamsuddin, Rahman. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014.

Simons, D. *leerboek van het Nederlandsche Strafrecht. Erste Deel. Virde druk. P. Nooordhoff, Groningen.*

Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana (Peraturan dan Delik-delik Khusus)*, Bogor : Politeria, 1984.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta : CV Budi Utama, 2018.

Tirtaamidjaja, *Pokok-Poko Hukum Pidana*, Jakarta : Fasco, 1955.

Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta : CV. Budi Utama, 2017.

Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Usman, Husaini. dkk, *Metode Penelitian Sosial* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004

Peraturan Perundang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pegawai Negeri.

Jurnal :

Amiruddin, Muhammad. *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas*, Jurnal, 2018.

Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana*, Jurnal, 2015.

Masiie, Mahendri. *Tindak pidana dengan Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal, 2015.

Website :

<https://www.google.com/amp/s/risalahnet.wordpress.com/2014/02/12/korupsi-ghulul-menggelapkan-harta-rakyat/amp/>, Di akses pada Selasa tanggal 22 September 2019, pukul : 15:50.

Wawancara

Muhammad Salam Giri Basuki (41 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, *Wawancara*, Makassar, 12 Desember 2019.

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Thezar, lahir di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 03 Desember 1997. Penulis lahir dari pasangan Saparuddin dan Mantasia dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Pendidikan penulis dimulai pada tahun 2003 di Taman Kanak-Kanak (TK) Prima Nusantara Kabupaten Gowa, kemudian melanjutkan di pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bontopajja, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa pada tahun 2004-2010. Pada tahun 2010-2013 penulis kemudian lanjut pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kab.Gowa. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kab.Gowa pada tahun 2013-2016.

Pada tahun yang sama, penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Sya'riah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar melalui jalur SBMPTN. Pada bulan Maret-April 2020 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Lembang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng.

Dengan rasa keyakinan, motivasi, dan kemauan yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wata'ala atas terselesaikannya skripsi yang berjudul, “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :411/B/2019/PN MKS Tahun 2019)**”.